

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan pembangunan nasional. Fungsi tersebut dijalankan melalui berbagai kegiatan, seperti audit, evaluasi, konsultasi, pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta pengembangan sumber daya manusia di bidang audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pengawasan yang dilakukan BPKP menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki tingkat kompleksitas proyek infrastruktur yang tinggi, dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan publik (Yuridis et al., 2024)

Sebagai aparat pengawas intern pemerintah, BPKP lebih menekankan pendekatan preventif melalui penguatan sistem dan peningkatan akuntabilitas keuangan. Dalam menjalankan perannya sebagai mitra manajerial bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, BPKP berfokus pada perbaikan sistem dibandingkan sekadar mendeteksi kesalahan. Secara mandiri, BPKP mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, dan tata kelola melalui kegiatan audit, pendampingan, serta konsultasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada hasil, sekaligus memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan tanpa mengambil alih kewenangan manajerial. SPIP sendiri bertujuan memberikan keyakinan yang memadai—meskipun tidak absolut—bahwa tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan melalui lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dalam hal ini, BPKP berperan membantu instansi dalam mengevaluasi dan memperkuat SPIP guna meminimalkan risiko serta mendeteksi potensi kesalahan sejak dini (Indriani & Siswantoro, 2023).

Kualitas audit pada BPKP Sumatera Utara umumnya diukur melalui indikator seperti ketepatan waktu pelaporan, tingkat temuan penyimpangan keuangan, serta implementasi rekomendasi oleh auditee. Berdasarkan laporan tahunan BPKP periode 2022–2024, terjadi peningkatan temuan ketidaksesuaian anggaran di pemerintah daerah Sumatera Utara sebesar 15–20% dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kualitas audit dan akuntabilitas publik. Dalam kaitannya dengan variabel penelitian, independensi auditor terbukti berperan dalam meningkatkan kualitas audit dengan meminimalkan bias, sedangkan kompetensi auditor melalui pengalaman dan pendidikan meningkatkan ketepatan temuan. Di sisi lain, audit tenure yang terlalu panjang berpotensi menimbulkan familiarity threat, ukuran entitas yang besar menuntut sumber daya lebih sehingga memengaruhi efisiensi, dan rendahnya audit fees dapat membatasi investasi pada pelatihan auditor yang berdampak pada penurunan kualitas audit (Muhidin & Arigawati, 2023).

Meskipun demikian, efektivitas pengawasan BPKP di daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait ketidakseimbangan faktor internal audit seperti independensi

auditor, kecukupan anggaran pengawasan, serta kapasitas teknis dalam menghadapi kompleksitas entitas berskala besar. Kondisi ini secara kolektif berpotensi menurunkan kualitas audit dan meningkatkan risiko penyimpangan keuangan, khususnya di wilayah dengan proyek infrastruktur bernilai tinggi seperti Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris yang sistematis untuk mengidentifikasi hubungan kausal antarvariabel yang memengaruhi kualitas pengawasan (Internal Audit Quality in North Sumatra Government, 2023).

Fenomena tersebut semakin diperkuat dengan adanya kasus korupsi proyek jalan pada Dinas PUPR Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar pada tahun 2025. Kasus ini mengungkap kelemahan dalam proses audit, di mana operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Kepala Dinas menunjukkan adanya penerimaan dana commitment fee sebesar Rp2 miliar, dengan barang bukti Rp231 juta. Kondisi ini diduga berkaitan dengan audit tenure yang panjang sehingga mengurangi independensi, serta rendahnya audit fees yang membatasi peningkatan kompetensi auditor. Akibatnya, praktik manipulasi melalui e-katalog tidak terdeteksi, meskipun terdapat sinergi antara BPKP dan KPK pasca-OTT. Selain itu, laporan kinerja BPKP Sumatera Utara tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 104,57% dari target, namun masih terdapat empat indikator kinerja utama pengawasan preventif yang tertunda serta kesenjangan pada SPI Level 3 di BLU/D, yang berpotensi menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Handoko & Sukristyanto, 2025).

Dari sisi penelitian terdahulu, studi Dibyani (2025) masih terbatas pada analisis kualitas audit BPKP secara nasional tanpa menyoroti konteks regional Sumatera Utara. Sementara itu, penelitian Iyasy (2025) lebih berfokus pada pendekatan Fraud Theory tanpa menguji peran mediasi antara independensi dan kompetensi pasca implementasi SPI 2025. Selain itu, belum terdapat penelitian yang mengembangkan model simultan yang mengintegrasikan lima variabel utama, yaitu audit tenure, ukuran perusahaan, audit fees, independensi, dan kompetensi auditor dalam konteks BPKP Sumatera Utara, sehingga menjadi kebaruan (novelty) dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengembangkan model simultan pasca-2025 dengan mengintegrasikan Fraud Triangle Theory (Situmeang & Susanto, 2024) dan IA-CM BPKP (2024) untuk menguji interaksi lima variabel tersebut secara empiris dalam konteks BPKP Sumatera Utara. Model ini diharapkan mampu mengatasi keterbatasan penelitian sebelumnya serta menghasilkan rekomendasi praktis berupa penguatan pengawasan berbasis risiko dan optimalisasi rotasi auditor menuju APIP Level 3, dengan target capaian 120% pada BUMD/BLU tertentu. Pendekatan ini juga didukung oleh Agency Theory (Jensen & Meckling, 2025) yang menjelaskan bahwa audit tenure yang panjang dapat memicu familiarity threat, audit fees yang rendah menciptakan tekanan finansial, serta rendahnya kompetensi auditor dapat memfasilitasi rasionalisasi kecurangan, sebagaimana tercermin dalam kasus yang terjadi. Melalui latar belakang tersebut, judul penelitian ini adalah ***PENGARUH AUDIT TENURE, UKURAN PERUSAHAAN, LEVEL OF AUDIT FEES, INDEPENDENSI DAN KOMPETENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA***

1.2 Teori pengaruh

1.2.1 Pengaruh Audit Tenure Terhadap Kualitas Audi

Audit tenure merujuk pada lamanya periode penugasan auditor terhadap laporan keuangan suatu entitas dalam tahun buku tertentu (Sigolgi & Djamil, 2024). Durasi hubungan antara auditor dan klien ini berpotensi memengaruhi kualitas audit, terutama dalam hal independensi auditor selama proses pemeriksaan. Hubungan yang terlalu panjang dapat menurunkan tingkat profesionalisme auditor dalam mengungkap bukti audit secara objektif (Mahdalena & Lilianti, 2023). Dalam pelaksanaan tugasnya, auditor dituntut untuk senantiasa menjaga independensi dan objektivitas. Namun, interaksi yang berlangsung dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan kedekatan emosional antara auditor dan klien, sehingga berpotensi mengurangi sikap independen dan objektif dalam proses audit.

1.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit

Perusahaan dengan total aset yang besar umumnya memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi, sehingga dinilai lebih mampu menghadapi tekanan keuangan. Hal ini didukung oleh keberadaan sistem pengendalian internal yang lebih terstruktur dan efektif (Pamungkas dkk., 2022). Sistem pengendalian internal yang baik pada perusahaan berskala besar juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas audit, karena mempermudah auditor dalam memperoleh serta mengakses informasi yang relevan selama proses pemeriksaan.

1.2.3 Pengaruh Fee Audit Terhadap Kualitas Audits

Audit fee atau biaya audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, karena memungkinkan auditor untuk melaksanakan prosedur audit secara lebih mendalam dan komprehensif. Penelitian Pertiwi (2024) mengungkapkan bahwa besaran audit fee yang lebih tinggi memberikan ruang bagi auditor untuk mengalokasikan sumber daya secara memadai, sehingga meningkatkan efektivitas serta ketelitian dalam proses audit, khususnya pada perusahaan berskala besar yang cenderung bersedia membayar biaya audit lebih tinggi. Oleh karena itu, audit fee dapat dijadikan sebagai indikator penting dalam menjamin kualitas audit yang optimal dalam sistem pengawasan keuangan.

1.2.4 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit

Independensi auditor merupakan faktor penting dalam proses audit untuk memastikan kualitas hasil pemeriksaan yang baik. Opini audit yang dihasilkan bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap laporan keuangan yang disajikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat independensi auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit (Munawarah, 2022; Saputri et al., 2022).

1.2.5 Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit

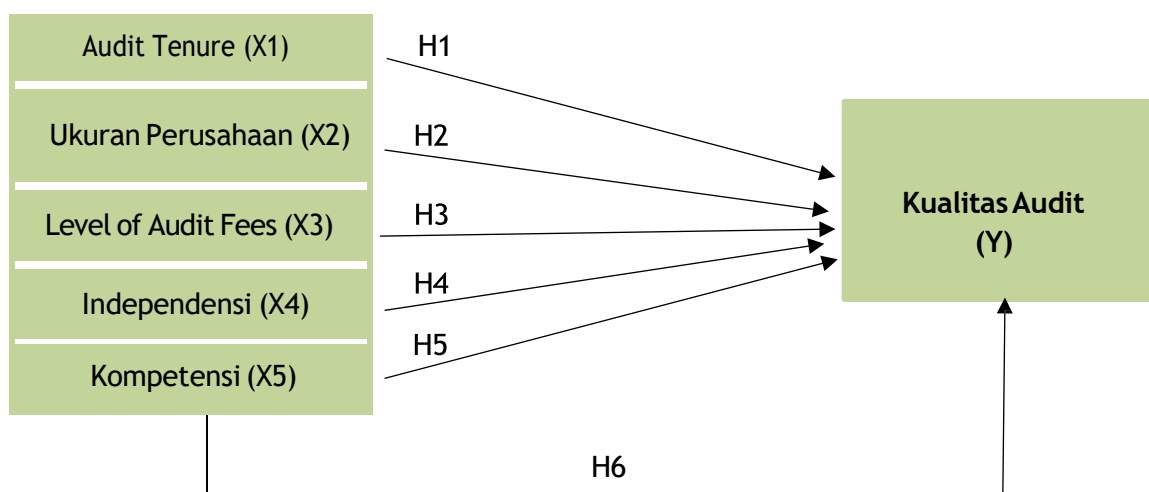
Kompetensi auditor terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap

kualitas audit, karena auditor yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai mampu melaksanakan prosedur audit secara lebih efektif dan akurat. Penelitian Ayustine (2024) juga menunjukkan bahwa kompetensi merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan audit dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal. Oleh karena itu, kompetensi auditor menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga kualitas audit, khususnya pada lingkungan pengawasan keuangan seperti BPKP Provinsi Sumatera Utara.

1.2.6 Pengaruh Audit Tenure, Ukuran Perusahaan, Level Audit of Fees, Independensi dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit

Masa penugasan audit yang tepat memungkinkan auditor untuk memahami karakteristik bisnis perusahaan secara lebih mendalam, sementara ukuran perusahaan turut memengaruhi tingkat kompleksitas dalam proses audit. Selain itu, audit fee yang memadai memberikan dukungan sumber daya yang cukup bagi auditor untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. Independensi auditor menjadi faktor penting dalam menjaga objektivitas selama proses audit, sedangkan kompetensi teknis memastikan bahwa prosedur audit dilakukan secara akurat dan sesuai standar. Secara simultan, kelima faktor tersebut berkontribusi dalam meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan (Muhidin & Arigawati, 2023)

1.3 Kerangka Konseptual



Gambar 1.1

1.4 Hipotesis Penelitian

H1: Audit Tenure berpengaruh terhadap kualitas audit Pada BPKP Provinsi Sumatera Utara

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit Pada BPKP Provinsi Sumatera Utara

H3: Level of Audit Fees berpengaruh terhadap kualitas audit Pada BPKP Provinsi Sumatera Utara.

H4: Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit Pada BPKP Provinsi Sumatera Utara.

H5: Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit Pada BPKP Provinsi Sumatera Utara.

H6: Audit Tenure, Ukuran Perusahaan, Level of Audit Fees dan Independensi Dan Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit Pada KAP kota Medan